

STRATEGI PELAKSANAAN DAKWAH 'AISYIYAH MELALUI PENDEKATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT LOKAL

Miftahulhaq

Dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
email: miftahulhaq@umy.ac.id

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian deskriptif kualitatif pada pelaksanaan program Qoryah Thayyibah (QT) di Potorono, Banguntapan, Bantul, DIY. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri dengan menekankan aspek agama sebagai inti dari seluruh pelaksanaan kegiatan.

Program ini merupakan program yang digagas dan dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah. Pelaksanaan program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan dakwah, sehingga dalam pelaksanaannya program ini mencoba mengintegrasikan berbagai model dakwah yang ada, dengan lebih menekankan pada model dakwah jama'ah melalui pendekatan pembangunan masyarakat lokal.

Program ini memiliki 6 (enam) karakteristik program, yaitu; agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan dan keluarga sakinah. Program QT ini memiliki tahapan pelaksanaan program; berupa tahapan persiapan dilakukan dengan penyiapan lapangan dan penyiapan petugas, tahap kedua melakukan identifikasi masalah dan tahap berikutnya melakukan penentuan program yang akan dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat, dengan terlebih dahulu menentukan program tahunan dan bulanan. Tahapan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan program atau kegiatan, kemudian tahapan terakhir adalah tahapan evaluasi.

Kata kunci: dakwah, pembangunan masyarakat lokal, 'Aisyiyah

Pendahuluan

Dakwah dalam ajaran Islam pada hakekatnya merupakan proses perubahan sosial terencana yang bertujuan untuk menjadikan sasaran dakwah menjadi lebih baik, baik dari segi rohani maupun kehidupannya di dunia. Melalui dakwah diajarkan berbagai macam nilai-nilai yang *ma'ruf*, semisal kerja keras, disiplin, toleransi, dan sebagainya, dan juga diperkenalkan berbagai macam larangan berbuat *munkar*, semisal berbuat kerusakan, permusuhan, malas dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan dakwah, maka dalam kegiatan dakwah dikenal ada beberapa model dakwah, yaitu dakwah *bil-lisan* (dakwah dengan perkataan), seperti ceramah, kajian, kutbah, dakwah *bil-qalam* (dakwah melalui media tulisan), seperti surat kabar,

bulletin, majalah, dan dakwah *bil-hal* (dakwah dengan kegiatan nyata), seperti penyediaan layanan sosial, pendampingan, dan lain sebagainya.

Pendekatan pelaksanaan dakwah harus mampu mensinergikan antara pembangunan spiritual, sosial, ekonomi, termasuk pembangunan fisik. Dakwah harus dilakukan sebagai proses multidimensional sehingga akan menciptakan perubahan besar kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, dakwah harus mampu mendukung apa yang menjadi kekuatan pembangunan masyarakat, yang terdiri dari; 1) kebutuhan pembangunan sosial yang ditujukan pada tiga situasi level, yaitu individu/keluarga/komunitas, *civil society*, dan *state/national institutions*; 2) kebutuhan pembangunan sosial yang ditujukan pada empat dimensi/ukuran yang mendasari masyarakat, yaitu struktur sosial, relasi sosial, proses sosial, dan nilai-nilai sosial; dan 3) pembangunan sosial berada dalam lima domain (wilayah) masyarakat, yaitu sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya, di mana kesemuanya saling berhubungan.

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi dakwah Islam yang bergerak pada bidang keagamaan dan kemasyarakatan, sejak kelahirannya telah *concern* terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses kelahirannya, Muhammadiyah tidak terlepas dari semangat untuk beramal shalih, salah satunya melalui kegiatan penyantunan fakir miskin, anak yatim dan kaum *dhuafa* (lemah). Semangat ini didasari oleh ajaran al-Qur'an dalam surat al-Maun, sekaligus sebagai wujud dari aktualisasi ketauhidan seorang muslim. Walau Kyai Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) saat itu tidak mengenal teori-teori ilmu sosial dan sebab musabab kemiskinan, namun kesadaran agamanya telah mendorong untuk secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial (Rais, 1995: 14-15).

Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah menjadikan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai model gerakannya. Dalam proses dakwahnya, Muhammadiyah mempunyai panduan, tatacara, metodologi dan pendekatan dalam memandu para pelaku dakwah di lapangan sesuai dengan ajaran yang telah digariskan dalam al-Qur'an. Abdullah dalam (*Suara Muhammadiyah No. 2/2002*: 34) menyatakan bahwa pada sisi substansi, Muhammadiyah memandang bahwa dakwah bertujuan untuk dilakukannya hal-hal yang baik (*ma'ruf*) seperti ketakwaan, spiritualitas, *akhlaq*, keadilan, kejujuran, kemakmuran, keterbukaan, tanggungjawab, kebebasan, kebersamaan, kesetaraan, simpati, kerjasama,

mutual trust, empati, toleran, kerjasama, keterampilan dan kesantunan sosial dan di jauhi atau ditinggalkannya hal-hal yang dianggap buruk oleh masyarakat (*munkar*) seperti kekufuran, kezaliman, kemiskinan, penindasan, kemunafikan, ketertutupan, fanatisme golongan, eksklusivitas, antipati, intoleran, *prejudice* (buruk sangka), anarkisme, premanisme kebrutalan, kekerasan (*violence*) sosial, dan sebagainya. Sedangkan pada sisi metodologi dan pendekatan diperlukan ilmu-ilmu bantu sesuai sasaran dakwah yang dihadapi. Sehingga pada wilayah ini, sesungguhnya jauh lebih rumit dan kompleks. Situasi politik, latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, kultur, adat-kebiasaan setempat perlu diteliti dan dikaji secara mendalam, sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

Prinsip dakwah Muhammadiyah semacam ini juga menjadi prinsip dakwah bagi organisasi otonomnya, semisal Aisyiyah, yaitu sebuah organisasi otonom Muhammadiyah khusus yang bergerak dalam kalangan wanita. Secara historis, kelahiran dan berdirinya Aisyiyah mempunyai latar belakang yang sama dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah, namun yang ditekankan adalah pada kondisi wanita saat itu (PP Aisyiyah, t.t: 17).

Sebagai sebuah organisasi, Aisyiyah memiliki beberapa badan pembantu pimpinan yang disebut Bagian. Masing-masing bagian tersebut memiliki wewenang dan bidang garap pengelolaannya masing-masing. Di antara bagian tersebut adalah Bagian Tabligh yang *concern* terhadap kegiatan-kegiatan dakwah dan pengembangan masyarakat. Bagian ini juga memiliki fungsi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan dakwah Aisyiyah.

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian ini memiliki beberapa model dakwah yang digunakan untuk memperoleh hasil maksimal dalam usaha peningkatan kehidupan umat. Beberapa model dakwah yang digunakan oleh Aisyiyah adalah; (i) model dakwah yang menitikberatkan pada penggunaan media penyampaian lisan, baik melalui ceramah, kutbah, pengajian, maupun visitasi ke rumah, (ii) model dakwah yang menggunakan media tulisan, seperti buletin, majalah, surat kabar, dan lain-lain, (iii) model dakwah dengan menggunakan “perbuatan” yang dilakukan oleh para mubalighat (penyampai dakwah). Model ini biasanya digunakan dalam usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui berbagai macam kegiatan, di samping dapat juga melalui kegiatan *charity* berupa pemberian santunan, dan sebagainya, (iv) model dakwah yang menjadikan kehidupan jama’ah (kelompok) sebagai sarana dan sekaligus menjadi obyek dakwah. Sasaran dalam model

dakwah ini bukan hanya bersifat individu, tetapi seluruh anggota kelompok masyarakat tertentu untuk secara bersama melakukan pengembangan masyarakat. Namun, dalam proses pelaksanaannya, model-model dakwah tersebut tidak selalu berdiri sendiri, tetapi dapat pula dilakukan secara berdampingan dan saling melengkapi (PP Aisyiyah, t.t: 62-64).

Di antara berbagai implementasi model dakwah tersebut adalah pelaksanaan program *Qoryah Thayyibah* (QT). Program ini bertujuan untuk melakukan pengembangan masyarakat sehingga terbina masyarakat yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui berbagai aktifitas dakwah yang terangkum dalam proses perencanaan dakwah yang meliputi kegiatan identifikasi masalah, merumuskan dan memilih model pendekatan/pemecahan masalah, dan menetapkan strategi pemecahan masalah tersebut.

Konsep utama dari program QT adalah konsep dakwah melalui model pendekatan jama'ah atau lebih dikenal dengan istilah Gerakan Jama'ah dan Dakwah Jama'ah (GJDJ). Konsep ini merupakan konsep dakwah yang menempatkan seseorang atau sekelompok orang sebagai penggerak utama yang disebut inti jama'ah. Inti jama'ah ini merupakan komponen fungsional pokok untuk menggerakkan dakwah jama'ah dengan mengajak dan memotivasi warga jama'ah untuk secara sadar berupaya meningkatkan pemahaman dan penghayatan ajaran Islam, serta menerapkannya dalam hidup bermasyarakat guna mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat (Mulkhan, 1996: 215-216). Dalam konsep ini selanjutnya ada tiga pengertian pokok yang harus difahami, yaitu; Pertama, inti jama'ah, yaitu tim da'i yang menjadi penggerak utama. Ke dua, dakwah jama'ah, yaitu bentuk kegiatan dakwah (dalam makna yang luas, khususnya yang bersifat pengembangan masyarakat) yang dilakukan oleh inti jama'ah dalam membina jama'ah. Ke tiga, jama'ah, yaitu kelompok keluarga yang berada dalam lingkungan geografis yang sama dengan inti jama'ah, yang berhasil terbina dengan kegiatan dakwah jama'ah tersebut, sehingga menjadi warga jama'ah.

Program QT yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah merupakan kegiatan dakwah yang melakukan intervensi komunitas dengan pendekatan pengembangan masyarakat lokal. Hal ini dapat terlihat dengan contoh kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program QT sebagai bagian pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosialnya.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hal ini berangkat dari pemaknaan pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri, sebagaimana yang dinyatakan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000, h. 3) bahwa “metodologi kualitatif” merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Oleh karena itu penelitian ini menggambarkan secara lebih rinci tentang proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program QT, sebagaimana yang dinyatakan oleh Neuman (2000, h. 21-23) bahwa penelitian deskriptif itu berupaya menampilkan gambaran situasi, seting sosial, atau hubungan yang lebih rinci.

Pengembangan Masyarakat Lokal (*Locality Development*)

Metode pengembangan masyarakat lokal (*locality development*) merupakan metode pengembangan masyarakat yang memprioritaskan pada pengembangan solidaritas dan kemampuan/kompetensi masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dikatakan Khinduka dalam (Rothman, 1995, h. 243), bahwa pengembangan masyarakat lokal adalah dimaksudkan untuk melakukan pendidikan dan pemberian motivasi masyarakat guna berupaya mandiri (*self-help*), mengembangkan responsibilitas pemimpin (elite) lokal, menciptakan kehidupan masyarakat yang penuh cinta kasih, memperkenalkan dan memperkuat demokratisasi di tingkat *grassroot* sehingga mampu menciptakan atau memperkuat instrumen untuk partisipasi masyarakat lokal, dan mempercepat masyarakat untuk menciptakan hubungan yang harmonis.

Friedlander (1982, h. 155) menyatakan bahwa model pengembangan masyarakat lokal ini bersumber dari praktek pengorganisasian masyarakat tradisional, baik masyarakat secara keseluruhan atau sebagian dari mereka. Karenanya dia berpendapat bahwa nilai yang sebenarnya ada dalam pengembangan masyarakat lokal adalah proses untuk mampu menolong diri sendiri (*self help*) dan melakukan aksi bersama. Asumsi dasarnya adalah bahwa

setiap anggota masyarakat memiliki keinginan bersama dan di antara mereka memahami bahwa satu dan yang lainnya dapat bekerjasama secara demokratis untuk mencapai kesepakatan tentang penentuan langkah-langkah guna meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Tujuan dari pengorganisasian masyarakat adalah untuk memaksimalkan keterlibatan warga (klien) dalam menentukan rencana yang rasional atau menentukan solusi terhadap persoalan yang menjadi sasaran. Pelaksana (*the worker*) pengembangan masyarakat lokal bertindak sebagai penghubung (*catalyst*) untuk melakukan perubahan dan mempercepat kelompok sasaran mampu mencapai objektif (tujuan) yang telah diidentifikasi.

Sebagai sebuah proses, pengembangan masyarakat dalam penerapannya memiliki prinsip-prinsip tertentu. Prinsip ini pada dasarnya merupakan koridor yang melandasi atau menjiwai pengembangan masyarakat agar mencapai tujuannya. Dunham dalam (Adi, 2003, h. 218-219) menyatakan ada lima prinsip dasar yang amat penting diperhatikan oleh mereka yang berminat pada aktivitas pengembangan masyarakat:

- a. Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat, bahwa pengembangan masyarakat harus mempertimbangkan keseluruhan kehidupan masyarakat, dan tidak hanya untuk segmen tertentu dalam kehidupan masyarakat.
- b. Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat, di mana tidak hanya nenekankan pada pendekatan multi profesi, tetapi juga multi lapisan profesi.
- c. Kebutuhan akan adanya *community worker* yang serba bisa, di mana ia harus mampu bekerja pada berbagai basis pekerjaan.
- d. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal.
- e. Adanya prinsip kemandirian, di mana pengembangan masyarakat harus dilakukan bersama masyarakat, bukan sekedar untuk masyarakat.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pendekatan pengembangan masyarakat dikenal adanya tahapan perubahan yang terencana atau yang lebih dikenal sebagai tahapan intervensi atau tahapan pengembangan masyarakat. Partisipasi masyarakat, dalam ke semua tahapan pengembangan masyarakat merupakan komponen penting guna mencapai keberhasilan proyek atau program yang akan dilakukan. Menurut Adi (2001, h. 173-178) beberapa tahapan pendekatan pengembangan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan. Tahap persiapan ini di dalamnya ada tahap (a) penyiapan petugas; dan (b) penyiapan lapangan. Penyiapan Petugas ini terutama diperlukan untuk menyamakan

persepsi antar anggota tim agenda perubah (*change agent*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahap penyiapan lapangan, petugas pada awalnya melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara informal maupun formal.

2. Tahap *Assessment*. Proses *assessment* yang dilakukan di sini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan=*felt needs*) dan juga bersumber daya yang dimiliki klien. Dalam analisis kebutuhan masyarakat ini dapat menggunakan beberapa teknik, semisal SWOT, metode delphi, metode curah pendapat, dan sebagainya. Dalam proses *assessment* ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Di samping itu, pada tahap pelaku perubahan juga memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya.
3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan. Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam proses ini petugas bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan pada saat itu.
4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi. Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana. Dalam tahap pemformulasian rencana aksi ini diharapkan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.
5. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan. Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara petugas dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga.
6. Tahap Evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

Pengembangan Masyarakat Lokal Sebagai Strategi Dakwah

Keberadaan organisasi Muhammadiyah (termasuk 'Aisyiyah) di wilayah Potorono memiliki peran penting dalam menumbuhkan semangat keberagamaan di wilayah ini. Sebagai organisasi dakwah Islam, Muhammadiyah, menurut Azhar Basyir dalam (Mulkhan, 1996, h. 147-149) memiliki misi mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan perorangan, keluarga dan masyarakat. Misi ini sangat terkait erat dengan kesadaran akan pentingnya iman, karena iman dan amal tidak dapat dipisahkan. Iman yang sungguh-sungguh pasti akan melahirkan amal, dan amal hanya akan diterima di sisi Allah bila keluar dari iman yang benar. Melalui semangat ini pula Muhammadiyah senantiasa mengajak warganya secara individu untuk terus mentaati Allah dan Rasul-Nya, membawa keluarganya ke dalam kehidupan yang baik dan jauh dari jalan kesesatan, dan dalam bermasyarakat senantiasa menumbuhkan sikap dan perilaku yang mengandung rasa persaudaran dan solidaritas yang dalam, tanpa membedakan suku, agama, dan ras tertentu.

Sebagai upaya peningkatan kualitas dakwah 'Aisyiyah, Bagian Tabligh PP 'Aisyiyah melakukan proses pengembangan dakwah melalui program *Qoryah Thayyibah* (QT). Program yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah ini merupakan wujud kegiatan dakwah yang melakukan intervensi komunitas dengan pendekatan pengembangan masyarakat lokal. Gambaran proses pelaksanaan strategi dakwah melalui pendekatan pembangunan masyarakat lokal dalam program ini dapat dilihat dalam tahapan berikut ini:

1. Tahap Persiapan

Dalam proses pengembangan masyarakat, tahapan ini berisikan dua tahap yaitu; (a) Tahap penyiapan petugas; dan (b) Penyiapan lapangan. Penyiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim agenda perubah (*change agent*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahap penyiapan lapangan, petugas (*community worker*) pada awalnya melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara informal maupun formal. Dalam tahapan ini dapat pula dilakukan upaya memunculkan kesadaran masyarakat mengenai masalah yang mereka hadapi (*problem awareness*), sehingga dalam diri masyarakat muncul keinginan untuk berubah dan mencari bantuan dari luar sistem guna

membantu menggali dan menentukan kebutuhan yang riil dan kebutuhan yang mereka rasakan.

Upaya untuk penyiapan lapangan dilakukan oleh Bagian Tabligh dengan terlebih dahulu melakukan studi kelayakan. Kemudian memperkuat hubungan formal maupun informal dengan pihak pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Kemudahan untuk melakukan hubungan formal maupun informal ini sangat didukung dua faktor. Pertama, adanya hubungan organisatoris Muhammadiyah, di mana kepala desa saat adalah juga tokoh Muhammadiyah dan banyak dari tokoh Muhammadiyah/Aisyiyah yang menjadi penggerak masyarakat dan beberapa kegiatan masyarakat seperti kepala dukuh, ketua RT, pos yandu, dasa wisma, dan sebagainya. Ke dua, adanya faktor kepentingan pemerintah desa untuk mengikuti proses lomba desa.

Sedangkan dalam upaya penyiapan petugas di lapangan, yang dilakukan oleh Bagian Tabligh PP Aisyiyah adalah dengan: 1) mempersiapkan petugas dengan penyelenggaraan penataran mubalighat sebagai inti jama'ah, yang berfungsi sebagai petugas untuk mengetahui tentang masalah dan kebutuhan yang mereka hadapi secara riil oleh masyarakat. Oleh karena itu kepada para peserta disampaikan mengenai bagaimana cara mengisi angket untuk hal itu yang telah disediakan oleh tim bagian Tabligh PP Aisyiyah; 2) membentuk pengurus pelaksana kegiatan di lapangan, berkolaborasi dengan pihak pemerintah desa.

Inti jama'ah yang disiapkan oleh Bagian Tabligh PP Aisyiyah mempunyai peran ganda, yaitu sebagai kader terlatih yang diharapkan mampu menjadi penggerak dan pengjaga kesinambungan program bagi masyarakat. Di sisi lain, inti jama'ah juga diharapkan menjadi fasilitator yang mampu menjembatani masyarakat untuk menemukan masalah dan kebutuhannya sekaligus bagaimana mencari solusinya. Kemudian pengurus pelaksana yang bertugas untuk mengkoordinir pelaksanaan program, mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi.

2. Tahap Assessment

Tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan identifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan=*felt needs*) yang ada dalam masyarakat dan bersumber daya yang dimiliki masyarakat tersebut. Dalam proses *assessment* ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif

agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Di samping itu, pada tahap ini pelaku perubahan juga memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

Dalam tahapan ini, pelaksanaan QT menggunakan metode penyebaran angket. Penyebaran angket ini dilakukan oleh para inti jama'ah yang telah ditraining terlebih dahulu oleh tim pelaksana pilot proyek QT Bagian Tabligh PP Aisyiyah. Proses pengisian angket ini selain dilakukan secara *face to face* antara inti jama'ah dengan masyarakat, tetapi juga melalui proses pengamatan secara langsung oleh inti jama'ah tanpa pengetahuan secara langsung pula oleh warga masyarakat yang diidentifikasi. Hasil penyebaran angket ini selanjutnya berfungsi sebagai data dalam penyusunan program, dengan tanpa mengabaikan data yang telah ada sebelumnya terkait kondisi masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam tahapan ini berupaya untuk melakukan adanya proses pelibatan warga masyarakat secara aktif, baik dalam melakukan identifikasi masalah maupun dalam menentukan prioritas program.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Tahapan ini adalah tahap di mana mengajak warga secara partisipatif untuk mencoba melibatkan warga supaya berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Sehingga diharapkan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan betul-betul mampu memberikan solusi terhadap masalah dan kebutuhan mendasar yang dihadapi oleh warga masyarakat itu sendiri.

Dalam program QT, perencanaan program dilakukan oleh pengurus pelaksana QT melalui proses identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, dengan cara pengamatan secara tidak langsung oleh anggota pengurus, bahkan beberapa program hanya mengikuti kegiatan yang sudah ada sebelumnya, seperti kegiatan pos yandu, pengajian-pengajian dan sebagainya.

4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Tahapan ini adalah tahapan di mana *community worker* membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis,

terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana. Dalam tahap pemformulasian rencana aksi ini diharapkan *community worker* dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.

Dalam pelaksanaan program QT tahapan ini tidak dilaksanakan. Pemformulasian rencana aksi telah dilaksanakan secara langsung ketika perencanaan alternatif program atau kegiatan. Masyarakat pun tidak mengetahui bagaimana tujuan yang akan dicapai dari adanya program QT ini, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena memang masyarakat tidak diajak secara partisipatif menyusun dan menentukan berbagai program. Pengetahuan masyarakat tentang adanya program dan tujuan yang ingin dicapai hanyalah bersifat umum dan itu pun hanya disampaikan melalui kegiatan-kegiatan pengajian. Sedangkan mengenai pembuatan proposal untuk pencarian dana dilakukan oleh pihak tim pelaksana Bagian Tabligh PP Aisyiyah, pimpinan ranting dan pengurus pelaksana QT hanya melakukan penggalangan bantuan dari masyarakat, baik dalam bentuk dana maupun barang, melalui media pengajian dan kegiatan lain secara langsung.

5. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Tahapan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara petugas dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga. Pelaksanaan program QT menjadikan enam aspek yang menjadi karakteristik program sebagai enam bidang masalah yang coba dilihat dan dikelola dalam pelaksanaan program. Ke enam aspek tersebut adalah aspek agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hubungan sosial, dan keluarga sakinah. Pengelolaan ke enam aspek tersebut selanjutnya diimplementasikan dengan pelaksanaan beberapa kriteria yang telah ditentukan, misalnya dalam aspek ekonomi dengan peningkatan ekonomi keluarga, pengadaan lembaga layanan tertentu, dan sebagainya, sehingga diharapkan melalui pelaksanaan kriteria tersebut dapat memperbanyak kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi dan mampu memberi kesempatan kepada masyarakat lebih luas, tanpa melihat latar belakang mereka sebagaimana prinsip yang dikembangkan dalam gerakan dakwah jama'ah yang dijadikan sebagai strategi dari pelaksanaan program QT.

Namun demikian bukan berarti program-program tersebut tidak mengalami proses pengembangan atau perubahan. Beberapa kegiatan yang telah terbiasa dilakukan oleh masyarakat tersebut, oleh pengurus pelaksana dilakukan modifikasi dan inovasi, baik dalam bentuk pengelolaan maupun format, walau hal ini tidak dilakukan secara optimal. Di antaranya proses pengembangan atau perubahan program tersebut adalah perubahan format pengajian malam jum'at yang awalnya hanya dalam bentuk pembacaan surat yasin dan tahlil, kemudian ditambah dengan penerjemahan ayat dan pemberian ceramah. Pengelolaan makanan tambahan bayi dalam pos yandu yang awalnya tergantung pada bantuan pemerintah desa, diubah menjadi lebih mandiri dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Di samping itu, ada pula beberapa program baru yang dilaksanakan ditentukan dalam pelaksanaan program QT.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi bagi sebuah pelaksanaan program merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan dan mampu mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Evaluasi yang biasanya dilakukan dalam program pengembangan masyarakat, termasuk dalam program QT adalah evaluasi proses dari pelaksanaan program itu sendiri. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi ini adalah adanya keterlibatan para warga, *community worker*, dan lembaga yang memiliki program dalam proses evaluasi. Adanya keterlibatan warga ini diharapkan akan membentuk sistem dalam suatu komunitas untuk melakukan pengawasan internal, sehingga dalam waktu jangka panjang diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Di samping itu apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara program dan tujuan yang diharapkan, maka dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan suatu program atau kegiatan di kemudian hari.

Dalam pelaksanaan program QT, evaluasi proses ini dilakukan dalam waktu minimal setahun sekali. Metode yang digunakan adalah curah pendapat atau *brainstroming* yang dilakukan oleh pengurus pelaksana dan tim pelaksana Bagian Tabligh, tanpa adanya keterlibatan warga. Tujuan atau target dari berbagai program yang dilaksanakan per tahun pun tidak terkonsep secara baik, dan tidak pula memiliki ukuran atau indikator keberhasilan

program. Sehingga proses evaluasi tidak mampu secara optimal memotret keseluruhan pelaksanaan program secara obyektif.

Penutup

Program QT merupakan program dakwah yang multidimensional dan terintegrasi dengan menjadikan aspek agama sebagai program utama. Secara umum program ini menjadikan masyarakatnya mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri sehingga program QT telah memberikan daya dorong bagi upaya penciptaan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan yang lebih baik. Di antara hasil dan dampak yang dirasakan di antaranya dalam aspek lingkungan fisik, kesehatan, hubungan sosial dan kehidupan beragama masyarakat serta pengorganisasian berbagai kegiatan pengajian atau keagamaanya lainnya.

Pelaksanaan program QT ini setidaknya sudah dilakukan melalui beberapa tahap pelaksanaan program, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Namun ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian bahwa pelaksanaan program QT ini masih lebih banyak menggunakan pendekatan langsung. Ke depan pelaksanaan program QT akan lebih baik bila menggunakan pendekatan tidak langsung, di mana peran masyarakat atau warga Muhammadiyah lebih besar dalam proses semua tahapan pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amien. (2002). Dari tauhid sosial menuju dakwah kultural. Dalam *Majalah Suara Muhammadiyah No 2/Th. Ke-87/2002*, Yogyakarta
- Adi, Isbandi Rukminto. (2001). *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas: Pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- _____, Isbandi Rukminto. (2003). *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas: Pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis*. Edisi revisi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Basyir, Ahmad Azhar. (1996). Misi muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Dalam Abd. Munir Mulkhan. *Ideologisasi gerakan dakwah: Episode kehidupan M. Natsir dan Azhar Basyir*. Sipress, Yogyakarta
- Friedlander, Walter A. (1982). *Introduction to social sork*. New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited.
- Moleong, L.J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Cetakan ke-13. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mulkhan, Abd. Munir. (1996). *Ideologisasi gerakan dakwah: Episode kehidupan M. Natsir dan Azhar Basyir*. Sipress Yogyakarta
- Neuman, L.W. (2000). *Social research method: Qualitative & quantitative approach*. Allyn Bacon. Boston
- PP Aisiyyah. (t.t). *Buku panduan organisasi Aisiyyah*. PT Persatuan, Yogyakarta
- Rais, M. Amien. (1995). Cita-cita sosial muhammadiyah. Dalam M. Yunan Yusuf (ed). *Masyarakat utama: Konsepsi dan strategi*. Perkasa Jakarta
- Rothman, Jack., and Cnaan, Ram. A. (1995). Locality development and the building of community. Dalam Jack Rothman, Jhon L. Erlich, Jhon E. Tropman (ed). *Strategies of community intervention, macro practice*. Fifth Edition. Illinonis: FE Peacock Publishers. Inc